



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/PMK.03/2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI
SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014;
- b. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a terdapat perubahan jenis data dan informasi yang harus disampaikan dan penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014, penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi dilakukan dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

Pasal I

Mengubah angka 2, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 54, 55, dan 59 serta menambah 6 (enam) angka yaitu angka 62 sampai dengan angka 67 pada kolom 1 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013;
- dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 442

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 /PMK.03/2016
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN
JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA
PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN

Daftar Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain,
Rincian Jenis Data dan Informasi, Bentuk Data, Cara, dan Jadwal Penyampaian

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPbn), Kementerian Keuangan	I. Data MPN, paling sedikit memuat: 1. Nama KPPN 2. Tanggal pembukuan 3. Nama bank/pos 4. NTB (Nomor Transaksi Bank) 5. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 6. Akun penerimaan	Data transaksi MPN (Modul Penerimaan Negara) yang telah di rekon oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nilai setor rupiah 8. Nomor urut transaksi 9. <i>Reversal flag</i> kegiatan anggaran 10. <i>Flag</i> hasil rekon atas 11. <i>Flag</i> hasil rekon bawah 12. <i>Id</i> database 13. <i>Id</i> baris 14. Nomor Pokok Wajib Pajak 15. Kode KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
		II. Data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), paling sedikit memuat: 1. Tahun anggaran 2. Nama Satker 3. Nomor SPM 4. Kode akun 5. Nomor SP2D 6. Tanggal SP2D 7. Tanggal SPM	Data SP2D KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Harian (disampaikan hari berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Nilai pengeluaran 9. Tahun pengeluaran 10. Bulan pengeluaran					
		III. Data Potongan SP2D KPPN, paling sedikit memuat: 1. Tahun anggaran 2. Nama Satker 3. Nomor SPM 4. Kode akun 5. Nomor SP2D 6. Tanggal SP2D 7. Tanggal SPM 8. Bagian anggaran 9. Eselon I 10. Provinsi 11. Daerah Tingkat II 12. Nilai penerimaan 13. Nomor Pokok Wajib Pajak 14. Tahun Pajak 15. Jenis setoran		Elektronik	Online	1 Mei 2013	Harian (disampaikan hari berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		16. Nomor rekening transaksi 17. Nomor urut 18. NTPN					
		IV. Data Pengeluaran SP2D KPPN, paling sedikit memuat: 1. Tahun anggaran 2. Nama Satker 3. Nomor SPM 4. Kode akun 5. Nomor SP2D 6. Tanggal SP2D 7. Tanggal SPM 8. Nilai pengeluaran 9. Bulan pengeluaran 10. Tahun pengeluaran		Elektronik	Online	1 Mei 2013	Harian (disampaikan hari berikutnya)
		V. Data Pegawai Negeri Sipil Pusat, paling sedikit memuat: 1. Nama Satker 2. Kode Satker		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama anak Satker 4. Kode anak Satker 5. NIP pegawai 6. NPWP pegawai 7. Nama pegawai 8. Alamat pegawai 9. Tanggal lahir 10. Jenis kelamin 11. Kedudukan 12. Gaji pokok 13. Status kawin 14. Status pegawai 15. Golongan 16. Masa kerja tahun 17. Jabatan 18. Tunjangan terpencil 19. Tunjangan Papua 20. Kode hakim 21. Pendidikan	Contoh: Tugas Belajar/Aktif/MPP PNS atau CPNS Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		22. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) golongan 23. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kenaikan gaji berkala 24. <i>Grade</i> remunerasi 25. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS					
28	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	I. Profil Akuntan Publik (AP), paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Alamat tempat tinggal 3. Tempat dan tanggal lahir 4. NPWP 5. Nomor Registrasi AP 6. Nomor dan tanggal izin AP	Informasi umum mengenai identitas Akuntan Publik Nomor identitas yang diberikan PPAJP kepada Akuntan Publik Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Akuntan Publik	Elektronik	<i>Online</i>	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>7. Nomor dan masa berlaku keanggotaan asosiasi profesi</p> <p>8. Status AP</p>	<p>Nomor dan jangka waktu keanggotaan pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)</p> <p>Meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu (cuti); b. Mengundurkan diri; c. Meninggal; d. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin/pembatasan pemberian jasa tertentu/ pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu /pencabutan izin); e. Aktif; f. Tidak berlakunya izin 				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Nomor dan tanggal Surat Persetujuan/ Keputusan serta jangka waktu Persetujuan/ Keputusan					
		II. Profil Kantor Akuntan Publik (KAP), paling sedikit memuat: 1. Nama KAP 2. Bentuk usaha 3. Nomor registrasi AP pemimpin KAP 4. Nomor dan tanggal izin KAP 5. NPWP KAP 6. Alamat KAP	Termasuk Daftar Cabang Perseorangan/ persekutuan/firma Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nomor dan tanggal izin cabang KAP 8. Nomor registrasi AP pemimpin cabang 9. NPWP cabang KAP 10. Alamat cabang KAP 11. Status KAP	Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Meliputi antara lain: a. Penutupan; b. Aktif; c. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin/pembatasan pemberian jasa tertentu/ pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu/ pencabutan izin) d. Tidak berlakunya izin				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Nomor dan tanggal Surat Keputusan serta jangka waktu Keputusan					
		III. Daftar dan Riwayat Rekan KAP (AP dan non AP), paling sedikit memuat: 1. Nama rekan AP 2. Nomor registrasi AP 3. Nama rekan non AP 4. NPWP rekan non AP 5. Surat tanda terdaftar rekan non AP 6. Nama KAP 7. Terhitung mulai	Berisi data tempat bekerja AP dan non AP pada suatu KAP	Elektronik	Online	1 September 2013	Triwulan (paling lambat akhir bulan Maret, Juni, September, Desember)
		IV. Daftar Klien KAP, paling sedikit memuat: 1. Nama klien KAP 2. Alamat klien KAP 3. NPWP 4. Tahun buku	Data mengenai entitas yang merupakan klien KAP untuk pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Penandatanganan Laporan Auditor Independen (LAI) 6. Opini 7. <i>Go Public/Non Go Public</i> 8. Bidang usaha klien 9. Jumlah laba/rugi bersih klien 10. Jumlah aset klien	Nomor register AP yang menandatangani LAI				
		V. Daftar Auditor KAP, paling sedikit memuat: 1. Nama auditor KAP 2. Jenis kelamin (L/P) 3. Nama jabatan pada KAP 4. Terhitung mulai tanggal menempati jabatan pada KAP 5. Posisi dalam pelaksanaan Audit Umum 6. Jam kerja Audit Umum	Daftar pegawai yang bekerja sebagai auditor di KAP	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Mulai bekerja 8. Pendidikan terakhir					
		VI. Daftar Tenaga Kerja Asing KAP, paling sedikit memuat: 1. Nama KAP 2. NPWP KAP 3. Nama tenaga asing 4. Pendidikan terakhir 5. Keahlian profesional 6. Kewarganegaraan 7. Mulai bekerja 8. Nomor dan tanggal Surat Izin Kerja	Daftar pegawai KAP yang berkewarganegaraan asing	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
		VII. Laporan Keuangan KAP, paling sedikit memuat : 1. Nama KAP 2. NPWP KAP 3. Tahun buku 4. Neraca Komparatif 5. Laporan Laba Rugi Komparatif		Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Laporan Arus Kas					
		VIII. Profil Penilai Publik, paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Alamat tempat tinggal 3. Tempat dan tanggal lahir 4. NPWP 5. Nomor Izin Penilai Publik (NIPP) 6. Nomor dan tanggal Keputusan 7. Nomor dan masa berlaku keanggotaan Asosiasi Profesi	Informasi umum mengenai identitas Penilai Publik Nomor klasifikasi izin Penilai Publik Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Penilai Publik Nomor dan jangka waktu berlakunya keanggotaan pada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Status Penilai Publik	Meliputi antara lain: a. Penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri (cuti); b. Mengundurkan diri; c. Meninggal; d. Dikenakan sanksi (Pembekuan izin/ pencabutan izin) e. Aktif				
		9. Nomor dan tanggal Surat Persetujuan/ Keputusan serta jangka waktu Persetujuan/ Keputusan					
		IX. Profil Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP	Profil termasuk Daftar Cabang, Daftar Perwakilan, dan Daftar Rekan	Elektronik	Online	1 September 2013	Semesteran (paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Bentuk usaha KJPP 3. Nomor izin Penilai Publik bagi pemimpin/ pemimpin rekan KJPP 4. Nomor dan tanggal izin KJPP 5. NPWP KJPP 6. Alamat KJPP 7. Nomor dan tanggal izin pembukaan cabang KJPP 8. Nomor izin Penilai Publik pemimpin cabang KJPP 9. NPWP cabang KJPP 10. Alamat cabang KJPP	Perseorangan/ persekutuan/ firma Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha KJPP Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pembukaan Cabang KJPP				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>11. Daftar rekan PP</p> <p>12. Daftar nama rekan non PP</p> <p>13. Status KJPP</p> <p>14. Nomor dan tanggal surat keputusan serta jangka waktu Keputusan</p> <p>15. Nomor dan tanggal surat persetujuan pembukaan kantor perwakilan KJPP</p>	<p>Meliputi:</p> <p>a. Nama;</p> <p>b. Nomor Izin</p> <p>Meliputi antara lain:</p> <p>a. Penutupan;</p> <p>b. Aktif;</p> <p>c. Dikenakan sanksi (pembekuan izin/ pencabutan izin);</p> <p>d. Tidak berlakunya izin</p> <p>Nomor dan tanggal Surat Keputusan Kepala PPAJP tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Perwakilan KJPP</p>				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		16. Penanggung jawab kantor perwakilan KJPP 17. Alamat kantor perwakilan KJPP	Nama penanggung jawab kantor perwakilan KJPP				
		X. Daftar Klien KJPP, paling sedikit memuat: 1. Nama pemberi tugas/pengguna jasa KJPP 2. Alamat pemberi tugas/pengguna jasa KJPP 3. Tahun pelaporan 4. Status <i>Go Public</i> /Non <i>Go Public</i> 5. Kepemilikan 6. Jenis jasa yang diberikan 7. Bidang usaha	Data mengenai entitas yang merupakan klien KJPP untuk pemberian jasa penilaian dan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penilaian	Elektronik	<i>Online</i>	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Nama obyek/ perusahaan yang dinilai 9. Metode penilaian 10. Nomor dan tanggal laporan 11. Hasil penilaian objek yang dinilai 12. Penilai publik yang menandatangani laporan hasil penilaian	dalam jutaan rupiah				
		XI. Daftar Tenaga Kerja Asing KJPP, paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. NPWP KJPP 3. Nama tenaga asing 4. Nomor dan tanggal izin kerja dari instansi 5. Kewarganegaraan 6. Keahlian 7. Rencana kerja		Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Jangka waktu penugasan					
		XII. Laporan Keuangan KJPP, paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. NPWP KJPP 3. Tahun buku 4. Neraca Komparatif 5. Laporan Laba Rugi Komparatif 6. Catatan atas Laporan Keuangan		Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan (paling lambat akhir bulan Desember)
30	BPJS Ketenagakerjaan	I. Data Pendaftaran Perusahaan, paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 3. Alamat Perusahaan 4. NPWP 5. Bentuk Badan Hukum 6. Jenis Usaha Utama		Elektronik	Online	1 Maret 2014	Bulanan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Kepemilikan 8. Jumlah Tenaga Kerja					
		II. Data Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: 1. Nama Peserta 2. Nomor Kartu Peserta 3. Alamat Peserta 4. NPWP Peserta 5. Tanggal Lahir 6. Status Peserta		Elektronik	Online	1 Maret 2014	Bulanan
		III. Rincian Iuran Tenaga Kerja, paling sedikit memuat: 1. Nomor Kartu Peserta 2. Periode/Masa Laporan 3. Data Upah 4. Iuran JKK	Meliputi: a. total upah setahun b. jumlah bulan upah	Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Iuran JKM 6. Iuran JP Tenaga Kerja 7. Iuran JP Perusahaan 8. Iuran JHT TK 9. Iuran JHT Perusahaan					
		IV. Data Pendaftaran Proyek Konstruksi, paling sedikit memuat: 1. Nomor Pendaftaran 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Sumber Pembiayaan Proyek 5. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (NKKK) 6. Nilai Komponen Upah dari NKKK 7. Macam/Jenis Pekerjaan 8. Lokasi Proyek 9. Nomor IMB-PB 10. Tanggal IMB-PB 11. Nomor IMB		Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Tanggal IMB 13. Pemilik Proyek 14. Jumlah Tenaga Kerja 15. Tanggal Awal Proyek 16. Tanggal Akhir Proyek 17. SPK/Kontrak					
37	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi	I. Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi 2. Nama Pemilik 3. Alamat 4. Tahun pembuatan 5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 6. Jenis Kendaraan 7. Merk Kendaraan 8. Tipe Kendaraan 9. Isi Silinder (CC) 10. Bahan bakar		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah, paling sedikit memuat: 1. Nama Satker/ SKPD 2. Kode Satker/ SKPD 3. NIP Pegawai 4. NPWP Pegawai 5. Nama Pegawai 6. Alamat Pegawai 7. Tanggal Lahir 8. Jenis Kelamin 9. NIK 10. Telepon 11. Penghasilan Bruto 12. Penghasilan Neto 13. Neto disetahunkan 14. PTKP 15. PKP 16. PPh Terutang 17. PPh Dipotong 18. PPh KB/LB 19. NPWP Bendahara Gaji		Elektronik	Online	30 Juni 2016 untuk Tahun Anggaran 2015	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		20. Penghasilan Final 21. PPh Final					
		<p>III. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor SIUP 2. Tanggal SIUP 3. Status usaha (Perorangan/ Badan Usaha) 4. Nama Perorangan /Badan Usaha 5. NPWP Perorangan /Badan Usaha 6. Alamat Domisili Perorangan /Badan Usaha 7. Nama Penanggung Jawab Badan Usaha 	<p>Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.</p> <p>Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah: CV, PT, Firma, Yayasan, Koperasi, Kelompok, Perkumpulan, dsb</p> <p>NPWP Perorangan/ Badan Usaha adalah NPWP cabang/ domisili</p>	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Nomor Induk Kependudukan Perorangan/ Penanggung Jawab Badan Usaha 9. NPWP Penanggung Jawab Badan Usaha 10. Nama Pemegang Saham Dominan Badan Usaha 11. Nomor Induk Kependudukan Pemegang Saham Dominan	Nomor Induk Kependudukan Pemegang Saham Dominan diisi jika Orang Pribadi				
		IV. Data Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUP 2. NPWP pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Nomor SIPI 6. Tanggal SIPI	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanggal kadaluwarsa SIPI 8. Nama kapal 9. Gross Ton (GT) 10. Muat bersih (NT) 11. Volume palka 12. Alat tangkap 13. Tanda selar 14. Wilayah pengelolaan perikanan (WPP RI) 15. Status izin SIPI (Baru/Perpanjangan/Perubahan/Penggantian)					
		V. Data Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. NPWP pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Nomor izin SIKPI	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tanggal izin SIKPI 7. Tanggal kadaluwarsa izin SIKPI 8. Nama kapal 9. Gross Ton (GT) 10. Muat bersih (NT) 11. Volume palka 12. Tanda selar 13. Status izin SIKPI (Baru/Perpanjangan/Perubahan/Penggantian)					
		VI. Data Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) Ikan berdasarkan <i>logbook</i> , paling sedikit memuat: 1. Nama pemilik 2. Nomor SIUP 3. NPWP perorangan/ Badan Usaha 4. Alamat	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Jenis izin 6. Penanggung jawab 7. Nama kapal 8. Gross Ton kapal 9. Muat bersih (NT) 10. Volume palka 11. Nomor SIPI/SIKPI 12. Alat tangkap 13. Jenis ikan 14. Produksi (Satuan Ton)	Jenis Izin: Penangkapan, Pengangkut/ Pengumpul				
		VII. Data Unit Pengolahan Ikan (UPI), paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. Alamat domisili unit pengolahan ikan 3. NPWP perusahaan/ perorangan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor SIUP Pengolahan 5. Tanggal SIUP Pengolahan 6. Tanggal kadaluwarsa SIUP Pengolahan 7. Jumlah kapasitas produksi 8. Jumlah produksi 9. Jenis olahan (Beku, Segar, Pengalengan, Ikan Kayu, Pengasapan, Pengeringan, lainnya)					
		VIII. Laporan Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan/Pelabuhan Perikanan/PPI/TPI (UPT Daerah), paling sedikit memuat: 1. Nama pelabuhan 2. Nama kapal 3. Nomor SIPI/SIKPI 4. Nomor izin SIUP 5. NPWP pemegang SIUP	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Nama pemegang SIUP 7. Alamat pemegang SIUP 8. Jenis alat tangkap 9. Waktu penangkapan 10. Daerah penangkapan 11. Pelabuhan pangkalan 12. Jenis ikan 13. Berat ikan					
		IX. Data Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ perorangan 2. Nomor SIUP 3. NPWP pemegang SIUP 4. Nama pemegang SIUP 5. Alamat pemegang SIUP 6. Nomor SIPI 7. Periode pembayaran	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Tarif 9. Dasar pengenaan 10. Nilai pungutan					
		X. Data Laporan Pemasaran Hasil Penangkapan Ikan, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. NPWP pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Jenis pemasaran 6. Jenis ikan yang dipasarkan 7. Jumlah ikan yang dipasarkan 8. Nilai ikan yang dipasarkan	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Ekspor atau dalam negeri Satuan Ton Dalam Rupiah	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>XI. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor SIUP/Tanda Pendaftaran 2. Tanggal SIUP/Tanda Pendaftaran 3. Status usaha 4. Nama perusahaan /perorangan 5. NPWP perusahaan /perorangan 6. Alamat domisili perusahaan/ perorangan 7. Nama penanggung jawab 8. Nomor identitas penanggung jawab 9. NPWP penanggung jawab 	<p>Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.</p> <p>Status usaha: Perorangan atau Perusahaan</p>	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Jenis perizinan 11. Jenis komoditas budidaya 12. Alamat kegiatan budidaya 13. Luas areal budidaya 14. Koordinat areal budidaya	Pembibitan; Pembesaran; Pembibitan dan Pembesaran.				
		XII. Data Laporan Kegiatan Usaha (LKU) Perikanan Budidaya, paling sedikit memuat: 1. Nama pemilik 2. Nomor SIUP/Tanda Pendaftaran 3. NPWP perorangan/ Badan Hukum 4. Alamat perorangan /Badan Hukum 5. Penanggung jawab	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. NPWP penanggung jawab 7. Jenis perizinan 8. Alamat kegiatan budidaya 9. Tahun laporan 10. Triwulan laporan 11. Jenis komoditas budidaya 12. Produksi	Jenis Perizinan: Pembibitan; Pembesaran; Pembibitan dan Pembesaran Satuan Ton				
		XIII. Data Laporan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. NPWP pemegang SIUP 3. Nama pemegang SIUP 4. Alamat pemegang SIUP 5. Jenis pemasaran	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 31 Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Jenis ikan yang dipasarkan 7. Jumlah ikan yang dipasarkan 8. Nilai ikan yang dipasarkan					
		XIV. Data Pertambangan, paling sedikit memuat data: 1. Nama pemegang izin pertambangan 2. NPWP pemegang izin pertambangan 3. Alamat pemegang izin pertambangan 4. Instansi penerbit dari izin pertambangan (Pusat, Gubernur atau Bupati) 5. Kode wilayah izin usaha pertambangan 6. Wilayah izin usaha pertambangan (lokasi Kabupaten/Kota)	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Luas izin usaha pertambangan 8. Jenis izin yang diterbitkan (IUP/IUPK/IPR/IUP OPK/IUJP) 9. Nomor izin pertambangan 10. Tanggal penerbitan izin pertambangan 11. Jangka waktu berlaku izin pertambangan 12. Tahapan kegiatan (penyelidikan umum/studi kelayakan/ eksplorasi/ konstruksi/ produksi) 13. Tahun mulai produksi 14. Jenis hasil tambang (jenis mineral atau batu bara) 15. Jumlah produksi (ton atau satuan tambang lainnya)					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		16. Jumlah penjualan (ton atau satuan tambang lainnya) 17. Nilai penjualan domestik (IDR/USD) 18. Nilai penjualan ekspor (IDR/USD) 19. Tujuan penjualan domestik 20. Tujuan penjualan ekspor 21. Nilai iuran tetap ekplorasi atau operasi produksi 22. Nilai iuran produksi (Royalti) 23. Tarif iuran tetap 24. Tarif royalti 25. Periode pembayaran iuran 26. SK Pengakhiran Izin Pertambangan (nomor dan tanggal) 27. Peta sebaran tambang					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		28. Jumlah pembelian (ton atau satuan tambang lainnya) 29. Nilai pembelian (IDR/USD)					
		XV. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB)		Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)
		XVI. Data Budidaya Hortikultura, paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. NPWP pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat/Gubernur/Bupati/Walikota) 5. Jenis izin yang diterbitkan 6. Nomor izin	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut. Meliputi tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias dan tanaman obat Antara lain: Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura, Izin Usaha Budidaya Hortikultura	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanggal penerbitan izin 8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah izin 10. Wilayah lokasi berada 11. Koordinat luas wilayah 12. Luas wilayah 13. Tahapan kegiatan usaha 14. Jenis tanaman/ komoditas 15. Luas tanam (Ha) 16. Waktu tanam/pola tanam 17. Jumlah tanaman 18. Jumlah produksi (Kg/Kw/Ton) 19. Kapasitas unit usaha 20. Jumlah tenaga kerja 21. Jumlah pemakaian pupuk /pestisida per Ha 22. Realisasi pembenihan dan pembibitan (Kg/Batang)					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		23. Jumlah pabrik pengolahan pemegang izin di wilayah Pemda 24. Kapasitas produksi pabrik pengolahan 25. Realisasi produksi pabrik pengolahan 26. Realisasi omset penjualan hasil pengolahan 27. Nilai penjualan domestik 28. Nilai penjualan ekspor 29. Jenis retribusi 30. Jumlah Iuran Retribusi/ PAD 31. Tarif Iuran Retribusi/ PAD 32. Periode Pembayaran Iuran Retribusi/PAD 33. Dasar Pengenaan Iuran Retribusi/ PAD	Setiap penjualan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XVII. Data Jumlah Rata-rata Produksi per Komoditas Tanaman per Ha, untuk Setiap Wilayah Provinsi/Kabupaten/ Kota	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan
		XVIII. Data Budidaya Tanaman Pangan/Pertanian, paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. NPWP pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat/Gubernur/ Bupati/Walikota) 5. Jenis izin yang diterbitkan (antara lain: IUTP, IUTP-P, IUTP-PT, TDU, TDU-P, TDU-PP) 6. Nomor izin 7. Tanggal penerbitan izin	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	30 Juni 2016	Tahunan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah Izin 10. Wilayah lokasi Pertanian 11. Koordinat luas wilayah pertanian 12. Luas wilayah pertanian 13. Jenis tanaman/ komoditas 14. Jumlah luas tanam 15. Jumlah luas panen 16. Jumlah penggunaan pupuk dan pestisida 17. Produktivitas/ Provititas (Kg per meter persegi) 18. Jumlah produksi (ton) 19. Omset penjualan hasil pertanian 20. Nilai penjualan domestik 21. Nilai penjualan ekspor 22. Jumlah buruh /karyawan 23. Jumlah retribusi/ PAD					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		24. Tarif Iuran retribusi/ PAD 25. Periode pembayaran iuran retribusi/ PAD 26. Dasar pengenaan iuran retribusi/ PAD	Setiap penjualan				
		XIX. Data Perkebunan dan Kehutanan, paling sedikit memuat: 1. Nama pemegang izin 2. NPWP pemegang izin 3. Alamat pemegang izin 4. Instansi penerbit izin (Pusat, Gubernur atau Bupati) 5. Jenis izin yang diterbitkan (antara lain: IUP, IUP-B, IUP-P, IPL, STD-B, STD-P, IPAB) 6. Nomor izin 7. Tanggal penerbitan izin	Untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki potensi tersebut.	Elektronik	Online	1 April 2016	Tahunan (paling lambat tanggal 1 April)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Jangka waktu berlakunya izin 9. Kode wilayah Izin 10. Wilayah lokasi perkebunan/ kehutanan berada 11. Koordinat luas wilayah perkebunan/ kehutanan 12. Luas wilayah perkebunan/ kehutanan 13. Tahapan kegiatan usaha 14. Jenis tanaman/ komoditas 15. Kelas lahan 16. Jumlah kapasitas produksi lahan 17. Jumlah realisasi produksi lahan 18. Jumlah penggunaan pupuk dan pestisida 19. Realisasi pembenihan dan pembibitan					

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyalpaian	Penyalpaian Pertama Kali	Jadwal Penyalpaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		20. Jumlah pabrik pemegang izin di wilayah Pemda 21. Kapasitas produksi pabrik perkebunan/ kehutanan 22. Realisasi produksi pabrik perkebunan/ kehutanan 23. Realisasi omset penjualan hasil perkebunan/ kehutanan 24. Nilai penjualan domestik 25. Nilai penjualan ekspor 26. Biaya gaji/upah buruh 27. Biaya gaji karyawan 28. Jumlah buruh/ karyawan 29. Jumlah iuran sektor perkebunan/ kehutanan ke Pemda 30. Tarif iuran sektor perkebunan/ kehutanan	Contohnya: produksi CPO, PKO, kayu bulat, dan Kayu Olahan Contohnya: produksi CPO, PKO, kayu bulat, dan kayu olahan Misalnya: hasil kebun, PKS, kayu, rotan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		31. Periode pembayaran iuran 32. Topografi 34. Curah hujan dan hari hujan 35. Investasi 36. Kendaraan/mobil alat berat 37. Pemanfaatan lahan 38. Produksi kebun inti 39. Bahan olah	Kelerengan lahan (datar, landai, berombak, berbukit, bergunung) Kebun (luas), Pabrik, Bangunan, Mesin, Prasarana Lain. Jenis, Status Kepemilikan Bangunan, pembibitan, TBM, TM, peremajaan, tanaman tua, penggunaan lain Per Jenis Produk : TBS, CPO, Kernel, PKO Bahan Olah, diolah sendiri atau tempat lain				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		40. Pembangunan kebun plasma 41. Produksi kebun plasma 42. Pemanfaatan produk sampingan / turunan 43. Peta sebaran perkebunan/ kehutanan 44. Rencana kerja tahunan dan Rencana kerja umum 45. Laporan penilaian perkebunan 46. Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Laporan Mutasi Kayu Bulat	Bangunan, Pembibitan, TBM, TM, Peremajaan, Tanaman Tua, Penggunaan lain Per jenis produk: TBS, CPO, Kernel, PKO Jenis Limbah, Bentuk Penanganan				

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	I. Data Kepemilikan Hotel/Penginapan, paling sedikit memuat: 1. Nama hotel/ penginapan 2. Alamat hotel/ penginapan 3. Jumlah kamar 4. Kelas hotel 5. Nama pemilik/pengelola 6. Alamat pemilik/ pengelola 7. Jumlah Pajak Hotel		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		II. Data Kepemilikan Restoran, paling sedikit memuat: 1. Nama Restoran 2. Alamat Restoran 3. Nama Pemilik/ pengelola 4. Alamat pemilik/ pengelola 5. Kapasitas pengunjung 6. Jumlah karyawan		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Jumlah Pajak Restoran					
		III. Data Usaha Hiburan, paling sedikit memuat: 1. Nama usaha hiburan 2. Alamat usaha hiburan 3. Nama pemilik/ pengelola 4. Alamat pemilik/ pengelola 5. Jenis hiburan 6. Jumlah Pajak Hiburan		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		IV. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), paling sedikit memuat: 1. Nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan 2. Alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan 3. Alamat objek		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nilai perolehan objek pajak 5. Luas tanah dan/atau bangunan 6. Tanggal Transaksi 7. Nilai BPHTB					
		V. Data Surat Izin Usaha, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Nama perusahaan 3. Alamat perusahaan 4. Jenis usaha 5. Nama pemilik 6. Alamat pemilik 7. Klasifikasi 8. Modal 9. Jumlah karyawan 10. Masa berlaku		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama pemohon 4. Alamat pemohon 5. Lokasi bangunan 6. Luas bangunan 7. Jumlah lantai 8. Fungsi /peruntukan bangunan 9. Status tanah		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		VII. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah, paling sedikit memuat: 1. Nama Satker/SKPD 2. Kode Satker/SKPD 3. NIP pegawai 4. NPWP pegawai 5. Nama pegawai 6. Alamat pegawai		Elektronik	Online	30 Juni 2016 untuk Tahun Anggaran 2015	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Februari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanggal lahir 8. Jenis kelamin 9. NIK 10. Telepon 11. Penghasilan bruto 12. Penghasilan netto 13. Neto disetahunkan 14. PTKP 15. PKP 16. PPh terutang 17. PPh dipotong 18. PPh KB/LB 19. NPWP Bendahara gaji 20. Penghasilan final 21. PPh Final					
40	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Data Pemenang Lelang, yang terdiri dari: 1. NPWP 2. Nama pemenang 3. Alamat 4. Nomor telepon		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat 7 hari kerja setelah akhir triwulan)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Jenis usaha 6. Tanggal izin usaha 7. Masa berlaku izin usaha 8. Nama paket pekerjaan 9. Lokasi paket pekerjaan 10. Tanggal kontrak 11. Nilai kontrak 12. Tanggal surat perintah mulai kerja 13. Masa pelaksanaan	Jenis usaha meliputi: 1. Jasa konstruksi 2. Jasa konsultan 3. Penyedia barang/jasa lainnya				
41	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	I. Data Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. NPWP badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Nama LKP 5. Alamat LKP		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) 7. Tanggal berdiri LKP 8. Alamat <i>email</i> LKP 9. Alamat <i>website</i> LKP 10. Nomor telepon LKP 11. Nomor <i>fax</i> LKP 12. Nama pimpinan LKP 13. NIK pimpinan LKP					
		II. Data Sertifikasi Guru, paling sedikit memuat: 1. Nama guru 2. Alamat rumah 3. Tempat dan tanggal lahir guru 4. NPWP guru 5. NIK guru 6. Nomor registrasi guru (NRG) 7. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Nama instansi tempat mengajar 9. Alamat instansi tempat mengajar					
		III. Data Penerima Dana Bantuan Sosial, paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. NPWP badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Status penerima Bantuan Sosial 5. Tanggal pendirian 6. Alamat <i>email</i> 7. Alamat <i>website</i> 8. Nomor telepon 9. Nomor faksimile 10. Nama pimpinan 11. NIK pimpinan	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki Komunitas Budaya/Sekolah Negeri/Sekolah Swasta/Lembaga Peduli Pendidikan	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Nama program bantuan sosial 13. Nilai bantuan sosial					
54	Kementerian Kelautan dan Perikanan	I. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ perorangan 2. NPWP perusahaan/ perorangan 3. Alamat perusahaan/ perorangan 4. Domisili hukum 5. Nomor izin 6. Tanggal izin 7. Nomor identitas penanggung jawab 8. Nama penanggung jawab 9. NPWP penanggung jawab	dapat berupa NIK/ No Paspor	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama kapal 3. Nomor izin SIPI 4. Tanggal izin SIPI 5. Tanggal kadaluwarsa SIPI 6. Gross Ton (GT) 7. Alat tangkap 8. Tanda selar 9. Wilayah penangkapan 10. Status izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		III. Data Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama kapal 3. Nomor izin SIKPI 4. Tanggal izin SIKPI		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Tanggal kadaluwarsa SIKPI 6. Gross ton 7. Tanda selar 8. Status izin					
		IV. Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/perorangan 2. Alamat unit pengolahan ikan 3. Jenis produk 4. Nomor izin produk 5. Tanggal terbit izin produk 6. Tanggal masa berlaku produk 7. NPWP perusahaan dan/atau NIK penanggung jawab	Sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasional standar sanitasi.	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		V. Data Izin Pemasukan Hasil Perikanan, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ penanggung jawab 2. Alamat perusahaan/ penanggung jawab 3. Nomor izin 4. Tanggal izin 5. Masa berlaku 6. Jenis Produk yang akan dimasukkan 7. Jumlah produk yang akan dimasukkan 8. Tempat pemasukkan 9. NPWP perusahaan dan/atau NIK penanggung jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data Lalu Lintas Ikan di dalam dan luar negeri (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ perorangan 2. Alamat perusahaan/ perorangan 3. Nomor izin instalasi karantina ikan 4. Tanggal izin instalasi karantina ikan 5. Masa berlaku 6. Wilayah pemasaran 7. Jenis lalu lintas (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri) 8. Jenis Produk yang dipasarkan 9. Jumlah produk yang dipasarkan/tahun	Wilayah pemasaran berisi negara tujuan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10.NPWP perusahaan/ perorangan 11>Nama pemilik/ penanggung jawab 12.NIK pemilik/ penanggung jawab					
		VII. Data Izin Penyediaan Obat Ikan (Produsen, Importir), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ perorangan 2. NPWP perusahaan/ perorangan 3. Alamat 4. Status (produsen/ importir) 5. Nomor izin 6. Tanggal izin 7. Masa berlaku 8. Nama pemilik/ penanggung jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. NIK pemilik/ penanggung jawab					
		VIII. Data Produsen Perbenihan, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/ perorangan 2. NPWP perusahaan 3. Alamat perusahaan/ perorangan 4. Jenis komoditas perbenihan (tawar/payau/laut) 5. Jumlah omzet tahunan (ekor) 6. Nama pemilik/ penanggung jawab 7. NIK pemilik/ penanggung jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		IX. Data Usaha Budidaya, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. NPWP perusahaan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Alamat 4. Jenis perizinan 5. Nomor izin 6. Tanggal izin 7. Masa berlaku 8. Komoditas budidaya 9. Nama penanggung jawab 10. NIK penanggung jawab	Jenis Perizinan/ Rekomendasi: 1. Izin Pemasukan Ikan Hidup 2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan 3. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal				

[illegible]

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XI. Data Transaksi Importase Obat Ikan		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)
		XII. Data Harga Benih Ikan/Udang per Provinsi		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)
		XIII. Data Produksi Pakan Ikan		Elektronik	Langsung	30 Juni 2016	Tahunan (paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya)
55	Kementerian Ketenagakerjaan	I. Data Pengguna Tenaga Kerja Asing, paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan/instansi 2. NPWP perusahaan/instansi 3. Alamat perusahaan/instansi	Data pengguna tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Triwulanan, (Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Nomor telepon, <i>fax</i> , <i>email</i> 5. Jumlah tenaga kerja asing					
		II. Daftar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Indonesia, paling sedikit memuat: 1. Nama LPTKS 2. NPWP LPTKS 3. Nama pimpinan atau penanggung jawab LPTKS 4. Alamat LPTKS	Data yang disampaikan sebatas data LPTKS yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)
		III. Daftar Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. NPWP perusahaan 3. Nama pimpinan atau penanggung jawab	Data yang disampaikan sebatas data PPTKIS yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Alamat perusahaan					
59	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	I. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2004	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2004	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>III. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 		Elektronik	Langsung	01 Desember 2004	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		<p>IV. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor izin 		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		V. Data Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		VI. Data Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Luas 10.Lokasi					
		VII. Data Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas di atas 6000m3/thn (IUIPHHK >6000 m3/thn), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10.Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII. Data Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>IX. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan/Non Tambang, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomor izin2. Tanggal izin3. Nama perusahaan4. NPWP5. Alamat6. Tanggal berdiri perusahaan7. Nama penanggung jawab8. NPWP/NIK penanggung jawab9. Luas10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		X. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XI. Data Izin Lembaga Konservasi (LK), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XII. Data Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		XIII. Data Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 11. Kuota Edar Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)					
		XIV. Data Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA), paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>XV. Data Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		<p>XVI. Data Izin Ekspor Benih/ Bibit Tanaman Hutan, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		XVII. Data Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan, paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal berdiri perusahaan 7. Nama penanggung jawab		Elektronik	Langsung	01 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
62	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Data Sertifikasi Dosen, paling sedikit memuat: 1. Nama dosen 2. Alamat rumah 3. Tempat dan tanggal lahir dosen 4. NPWP dosen 5. NIK dosen 6. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 7. Nama instansi tempat mengajar 8. Alamat instansi tempat mengajar	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (30 April tahun berikutnya)
63	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	I. Data pemenang lelang melalui <i>e-auction</i> , paling sedikit memuat: 1. Nama pemenang lelang 2. NPWP pemenang Lelang		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Bulanan (paling lambat akhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. NIK pemenang lelang 4. Alamat pemenang lelang 5. Email pemenang lelang 6. Jenis lelang 7. Uraian Lelang 8. Nilai Lelang 9. Tanggal pelaksanaan lelang 10. Nama pemohon lelang 11. Alamat pemohon lelang 12. Penyelenggara	Nama, pemilik objek, dan lokasi objek Nama KPKNL				
		II. Data balai lelang, paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. Nama penanggung jawab 3. NPWP 4. Nomor izin 5. Masa berlaku izin 6. Status (Aktif/Tidak aktif) 7. Alamat		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Frekuensi lelang per tahun 9. Pokok lelang dalam satu tahun 10. Bea lelang dalam satu tahun					
		III. Data pejabat lelang kelas II, paling sedikit memuat: 1. Nama Pejabat lelang Kelas II 2. NIK 3. NPWP 4. Nomor izin 5. Masa Berlaku izin 6. Status (Aktif/Tidak aktif) 7. Alamat 8. Frekuensi lelang 9. Pokok lelang 10. Bea lelang		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64	PT Taspen (Persero)	I. Data penerima pensiun, paling sedikit memuat: 1. NPWP 2. NIP atau NRP 3. Nama 4. Alamat 5. Jenis Kelamin 6. Tanggal Lahir 7. Status Tanggungan 8. Tahun perolehan 9. Penghasilan Bruto 10. Penghasilan Neto 11. Penghasilan Neto setahun/disetahun-kan 12. PTKP 13. PKP 14. PPh terutang 15. PPh dipotong 16. PPh KB/LB 17. Kantor bayar	Nomor Induk Pegawai / Nomor Registrasi Prajurit (untuk TNI)	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		18.NIK 19.Telepon 20.NPWP kantor cabang 21>Nama kantor cabang					
		II. Data Peserta Aktif, paling sedikit memuat: 1. NIP atau NRP 2. Nama 3. NIK 4. Pangkat/golongan 5. Alamat 6. Jenis kelamin 7. Tanggal lahir 8. Nama instansi 9. Gaji pokok 10.NPWP kantor cabang 11>Nama kantor cabang	Peserta aktif meliputi data PNS Pusat dan Daerah	Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
65	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	I. Data izin undian gratis berhadiah, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama penerima izin 2. Alamat lengkap penerima izin 3. NPWP penerima izin 4. Nama program 5. Nomor registrasi 6. Periode 7. Total hadiah 8. Jangka waktu penyelenggaraan 9. Nomor Surat Keputusan Menteri 10. Aktivitas terakhir 11. Jatuh tempo laporan 12. Status 13. Jumlah hadiah 14. Waktu penyelenggaraan 		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data pemenang Undian Gratis Berhadiah, paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NPWP 3. Alamat 4. Uraian hadiah yang diterima 5. Jumlah hadiah yang diterima 6. Nilai hadiah yang diterima 7. Waktu pengambilan hadiah 8. PPh Final atas hadiah undian 9. Tanggal penyetoran SSP 10. NTPN		Elektronik	Online	31 Maret 2016	Tahunan, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
66	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	<p><i>Database</i> registrasi produk dan perusahaan pemilik produk, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor registrasi 2. Tanggal terbit 3. Jenis produk 4. Nama produk 5. Nama perusahaan pendaftar 6. Alamat perusahaan pendaftar 7. Nama produsen 8. Alamat produsen 9. NPWP perusahaan pendaftar 	<p>Jenis produk: obat/obat tradisional/ kosmetik/ suplemen makanan/ produk pangan</p> <p>Merk produk</p>	Elektronik	<i>Online</i>	31 Maret 2016	Semesteran

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1. Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2. PT Bank ANZ Indonesia 3. PT Bank Bukopin, Tbk. 4. PT Bank Central Asia, Tbk. 5. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7. PT Bank MNC Internasional 8. PT Bank ICBC Indonesia	Data Transaksi Nasabah Kartu Kredit, paling sedikit memuat: 1. Nama bank 2. Nomor rekening kartu kredit 3. ID <i>merchant</i> 4. Nama <i>merchant</i> 5. Nama pemilik kartu 6. Alamat pemilik kartu 7. NIK/Nomor paspor pemilik kartu 8. NPWP pemilik kartu 9. Bulan tagihan 10. Tanggal transaksi 11. Rincian transaksi 12. Nilai transaksi 13. Pagu kredit	Data bersumber dari <i>Billing Statement</i> Nama bank/lembaga penyelenggara kartu kredit NIK untuk WNI; Nomor paspor untuk WNA Keterangan transaksi Dalam Rupiah Limit kartu kredit	Elektronik	<i>Online</i> dan/atau langsung	Paling lambat 31 Mei 2016	Bulanan (paling lambat akhir bulan berikutnya)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	9. PT Bank Maybank Indonesia,Tbk 10. PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. 11. PT Bank Mega, Tbk. 12. PT Bank Negara indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13. PT Bank Negara Indonesia Syariah 14. PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15. PT Bank Permata, Tbk. 16. PT Bank Rakyat Indonesia						

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(Persero), Tbk. 17. PT Bank Sinarmas 18. PT Bank UOB Indonesia 19. Standard Chartered Bank 20. The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21. PT Bank QNB Indonesia 22. Citibank N.A 23. PT AEON Credit Services						

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARO YUWONO
NIP 197109121997031001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

